



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2017

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan A.I.S Nasution Nomor 2 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221723 Fax. (0536) 3224903
E-mail : bandiklat.program@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala anugerah dan rahmat-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Dokumen ini disusun dengan maksud memberikan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Tahun 2017 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Didalam penyusunan dokumen Renja ini ada banyak hal yang di dapat. Hal ini tentunya dimaksudkan dapat memberikan manfaat dan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga dokumen renja SKPD tahun 2017 ini dapat diterima dan menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Januari 2017

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Drs. H. MUCHTAR, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19591111 198503 1 022

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

2.4 REVIEW TERDAHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 yaitu “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dan dengan Misi keenam Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah.

Sinergitas Visi dan Misi dalam suatu perencanaan pembangunan di bidang pendidikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat penting, baik dari sisi keterpaduan tujuan, sasaran juga dari sisi pengendalian dan pengawasan. **“Mewujudkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang Handal, Tangguh dan berdaya saing”**, dan Untuk mewujudkan Visi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi yang selaras dengan 7 (tujuh) misi daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yaitu pada misi keenam (6) Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusiasumber daya aparatur sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Menyelenggarakan Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan dalam mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah;
3. Penyediaan sarana, dan prasarana Diklat yang representatif;
4. Meningkatkan kompetensi aparatur Diklat dan terciptanya rasa kebanggaan terhadap lembaga Diklat;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan Diklat aparatur pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Diklat;
6. Pengembangan program Diklat sesuai persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan Diklat dalam bentuk kerjasama/kemitraan;
7. Mengelola Sistem Informasi dan Data kediklatan.

Pelembagaan Sistem Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pemerintah melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia sumber daya aparatur di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dengan demikian SKPD Provinsi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan berpedoman pada RPJMD yang telah memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, selanjutnya SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk satu tahun dengan pedoman Renstra yang sudah di susun, hal ini

sesuai dengan amanat Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Dalam hal ini penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2017 sebagaimana susunan sistematika berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada Paragraf 2, Pasal 139, Rancangan Renja SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan maksud :

- Memberikan gambaran dalam bentuk dokumen tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2017, mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2016 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Tahun 2016.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD, berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat tentang kebijakan umum yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

BAB.IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2017, memuat rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RKA.

BAB.V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Realisasi program dan kegiatan yang telah direncanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2014 pada pelaksanaannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga sesuai dengan Renstra Teknokratik Badan Pendidikan dan Pelatihan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Capaian tersebut berdampak positif terhadap perkiraan capaian program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja tahun 2016 yang diperkirakan juga akan dapat tercapai 100 %.

LAMPIRAN TABEL 2.1

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

LAMPIRAN TABEL 2.2

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	
1	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		100					33					33			
	Jumlah orang Lulus Ujian Prajabatan Gol II		100					2					2			
3	Jumlah orang Lulus Ujian Prajabatan Gol III		100					80					76			
4	Jumlah orang Lulus Ujian Diklat Pim II		100					80					80			
4	Jumlah orang Lulus ujian Diklat Pim III		100					2					2			
5	Jumlah Orang Lulus Ujian Diklat Pim IV		100					80					76			
6	Jumlah orang lulus Diklat Teknis Penata Laporan Keuangan dan Aset		100					80					80			
7	Jumlah orang yang lulus Diklat Kearsipan		100					40					40			
8	Jumlah Orang yang Lulus Diklat Teknis peningkatan Kapasitas Camat		0					0					0			
9	Jumlah orang yang Lulus Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan		0					0					0			
10	Jumlah orang yang Lulus Diklat Kompetensi Sekretaris Desa		100					40					40			
11	Jumlah orang yang Lulus Diklat teknis Keprotokolan		0					0					0			
12	Jumlah Orang yang lulus Diklat Orientasi Bagi Anggota DPRD kab/Kota		100					380					384			
13	Jumlah Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Asrama		100					1					1			

2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan telah melalui berbagai proses yang dilaksanakan bersama antar bidang dilingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah melalui berbagai kajian mendalam dikaitkan dengan renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan ketika telah dijadikan dokumen PPAS dan DPA pada saatnya nanti bias dijadikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Provinsi	Tertibnya administrasi surat menyurat	2.500 Buah	Kegiatan Lanjutan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi	Pemakaian telepon, listrik, air dan internet selama 1 tahun	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Provinsi	Tersedianya Polis Jaminan atas aset Gedung Kantor/ Asrama dan Fasilitas Lainnya	12 Lokal Bangunan	Kegiatan Lanjutan
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Provinsi	STNK Kendaraan Roda 4/ Bus untuk	3 Buah	Kegiatan Lanjutan
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Provinsi	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan, honorarium Tim SIMDA, honorarium SIMDA Barang, dan non PNS yang bekerja pada kantor 35 orang selama 1 tahun	1 Tahun untuk 35 Orang	Kegiatan Lanjutan
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bangunan/ Gedung	12 Bangunan	Kegiatan Lanjutan
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Provinsi	Service, Perbaikan Peralatan Kantor	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
8	Penyediaan alat tulis kantor	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan

9	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Provinsi	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan kantor	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Provinsi	Microphone, Soundsistem besera aksesoris lainnya, Brankas, Televisi, Komputer/PC all in one, Printer, Proyektor	10 buah, 4 paket, 1 buah, 3 buah, 55 buah, 5 buah, 10 buah	Kegiatan Lanjutan
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi	AC Split, Seprei	8 buah, 200 buah	Kegiatan Lanjutan
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Provinsi	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	3 Jenis	Kegiatan Lanjutan
13	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu berupa snack dan nasi kotak	3000 kotak	Kegiatan Lanjutan
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi	Terpenuhinya Pegawai yang melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi	Pegawai BANDIKLAT yang melakukan koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
16	Pengembangan Buletin Kediklatan	Provinsi	Tersedianya Bulletin Kediklatan	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
II Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pembangunan gedung kantor	Provinsi	Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama dan Ruang Belajar 3 Lantai Jl. AIS Nasution, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkungan Kantor Bandiklat, Lanjutan Pembangunan Asrama Samping Kiri bertingkat 2 lantai, lanjutan pembangunan asrama samping kanan bertingkat 2 lantai	5 paket	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Kendaraan roda 4 Operasional 1 Buah dan Roda 4 pengangkut sampah	2 buah	Kegiatan Lanjutan
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Pembuatan cafetaria	1 paket	Kegiatan Lanjutan
4	Pengadaan Meubelair	Provinsi	Karpet, Rak Buku, Meja Komputer, meja kerja staf, kursi kerja staf, lemari arsip kayu	1 paket, 20 buah, 42 buah, 30 buah, 30 buah, 10 buah	Kegiatan Lanjutan
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, aula dan asrama	12 Bangunan	Kegiatan Lanjutan
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 dan bus	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Provinsi	Terlaksananya service AC/ penggantian suku	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan

			cadang + pengisian freon 1 Tahun dan service telepon dan fax 1 tahun		
8	Pembuatan Grand Design	Provinsi	Pembuatan Maket Perencana	1 Paket	Kegiatan Baru
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Provinsi	Rehab sedang/berat asrama BANDIKLAT 2 lantai jalan AIS Nasution	1 Paket	Kegiatan Baru
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Provinsi	Tersedianya kebutuhan pakaian dinas PNS BANDIKLAT	200 Stel	Kegiatan Lanjutan
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Pengembangan Sumber Daya Manusiaformal	Provinsi	Tersedianya dana untuk pelatihan bagi pegawai 1 Tahun	77 Orang	Kegiatan Lanjutan
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BANDIKLAT	250 Eksemplar	Kegiatan Lanjutan
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Provinsi	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	25 Eksemplar	Kegiatan Lanjutan
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Provinsi	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	25 Eksemplar	Kegiatan Lanjutan
4	Penyusunan RKA-SKPD	Provinsi	Laporan Penyusunan RKA-SKPD BANDIKLAT	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
5	Penyusunan LAKIP	Provinsi	Laporan Penyusunan LAKIP SKPD	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
6	Penyusunan renja SKPD	Provinsi	Laporan Penyusunan Renja SKPD	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
7	Penyusunan laporan TEPPA/SIMPPD	Provinsi	Tersedianya dokumen laporan TEPPA/SIMPPD	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
8	Inventarisasi	Provinsi	Terinventaris dan Teridentifikasinya Aset Milik BANDIKLAT	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
VI	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				
1	Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov Kalteng	Provinsi	Tersedianya Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov kalteng	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
VII	Program Pendidikan Kedinasan				
1	Pendidikan penjenjangan struktural	Provinsi	PNS Provinsi yang telah mengikuti Diklat PIM dan telah memperoleh STTPL dengan rincian PIM II	408 Orang	Kegiatan Lanjutan
2	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Provinsi	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
3	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	Provinsi	Terlaksananya : 1 Widyaiswara/ Calon Widyaiswara yang dapat mengikuti Bimtek/TOT/Pelatihan Workshop/Kursus/Kursus Singkat/ Seminar/Lokakarya. 2. Konsultasi/ Mengantar	15 Orang,	Kegiatan Lanjutan

			DUPAK. 3.Pembinaan WI dan KTI. 15 Orang		
VIII	Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan				
1	Pengumpulan Dan Pengolahan Data kediklatan	Provinsi	Tersedianya pengolahan dan Pengumpulan Data Kediklatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan
2	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Provinsi	Terlaksananya Informasi Pelayanan Publik	1 Tahun	Kegiatan Baru
IX	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur				
1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Provinsi	CPNS Provinsi dan Kab/Kota ikut diklat prajabatan K1, K2, Gol.I, Gol.II dan Gol.III	960 Orang	Kegiatan Lanjutan
2	Diklat Kompetensi Sekretaris Desa	Provinsi	Terlaksananya Diklat Kompetensi Sekretaris Desa	80 Orang	Kegiatan Lanjutan
3	Diklat Pelatihan Keuangan Daerah	Provinsi	Terlaksananya Diklat Pelatihan Keuangan Daerah	120 Orang	Kegiatan Baru
4	Diklat Administrasi Kearsipan	Provinsi	Terlaksananya Diklat Administrasi Kearsipan	40 Orang	Kegiatan Lanjutan
5	Diklat Pengelolaan Keuangan Desa	Provinsi	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Desa	1434 Orang	Kegiatan Baru
6	Diklat Kompetensi Camat	Provinsi	Terlaksananya Diklat Kompetensi Camat. 40 Orang	40 Orang	Kegiatan Baru
7	Diklat Tata Naskah Dinas	Provinsi	Terlaksananya Diklat Tata Naskah Dinas	40 Orang	Kegiatan Baru
8	Diklat Pengelolaan Aset	Provinsi	Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset	40 Orang	Kegiatan Baru
9	Bimtek Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah	Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah	400 Orang	Kegiatan Baru
10	Peningkatan Akreditasi Diklat	Provinsi	Terlaksananya Akreditasi Diklat	1 Tahun	Kegiatan Baru
11	Diklat Training Officier Course (TOC)	Provinsi	Terlaksananya Diklat TOC	40 Orang	Kegiatan Baru
X	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur				
1	Evaluasi Alumni Pasca Diklat	Provinsi	Data Alumni Diklat yang menjalankan tugas di daerah masing-masing	1 Tahun	Kegiatan Lanjutan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (pasal 33) dinyatakan bahwa tugas pokok Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejalan dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan standarisasi kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur serta melaksanakan sistem komputerisasi administrasi kediklatan.

Program yang dilaksanakan meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Kedinasan, Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan, Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Pengembangan Aparatur yang merupakan acuan bagi sub bidang/bagian dalam menjalankan tupoksinya.

Sebagaimana diketahui, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu program/kegiatan pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Telaahan terhadap kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian

atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, Telaahan terhadap kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu program /kegiatan akhir pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan telaahan dan analisis lebih lanjut yang dapat dilihat dari nilai capaian kelompok indikator kinerja.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 yang ingin dicapai yaitu

A. Tujuan :

- Mengembangkan Program Diklat
- Meningkatkan Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan
- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat
- Memanfaatkan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam proses pendidikan dan pelatihan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Kediklatan
- Melaksanakan Diklat

B. Sasaran :

- Berkembangnya Program Diklat

- Meningkatnya Kapasitas SDM Tenaga Kediklatan
- Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Diklat
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Diklat
- Bermanfaatnya Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam proses Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama Kediklatan
- Terlaksananya Diklat

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program dan kegiatan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

16. Pengembangan Buletin Kediklatan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Mebeleur
3. Pembangunan Pagar, Taman dan Tempat Parkir
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penilaian Angka Kredit
2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan RKA-SKPD
4. Penyusunan LAKIP
5. Penyusunan Renja SKPD
6. Inventarisasi
7. Penyusunan Laporan TEPPA/ SIMPPD

VI. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Pemprov Kalteng

VII. Program Pendidikan Kedinasan

1. Pendidikan Penjurangan Struktural
2. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

VIII. Program Pengkajian, Pelayanan, Informasi dan Perpustakaan

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Kediklatan

IX. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
2. Diklat Kompetensi Camat
3. Diklat Keuangan Daerah
4. Diklat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
5. Diklat Inovasi
6. Diklat Pranata Komputer
7. Diklat Satpol PP
8. Workshop Mentor
9. Workshop Coach
10. Workshop Penguji

X. Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

1. Evaluasi Alumni Pasca Diklat
2. Kompetensi Inovasi Pasca Diklat

Program dan kegiatan mengalami perubahan memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas, hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel rencana program dan kegiatan SKPD pada Renja SKPD Tahun 2016 berikut :

Tabel 4. 1

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam dokumen Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah 2017 dengan berdasarkan atas perubahan aturan tentang organisasi. Selain itu juga mempertimbangkan untuk mewujudkan pelayanan kediklatan yang profesional melalui aparatur yang memiliki kompetensi, bermoral, akuntabel dan sejahtera sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagai agenda reformasi birokrasi.

Upaya pencapaian visi dan misi diarahkan pada pengembangan Sistem Manajemen Kediklatan seperti mengembangkan Sistem Manajemen Kediklatan yang ada, membudayakan instrumen/infrastruktur manajemen kediklatan, mengembangkan sistem informasi kediklatan dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya secara bertahap.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional bukan hal yang mudah karena menuntut adanya kejelasan komunikasi dan komitmen yang saling mendukung dari lini pelaksana sampai pada pejabat pembuat kebijakan.